



Keterlibatan Lintas Sektor pada Konvergensi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Padang

Rayhan Fadlan^{1*}, Rahmadani Yusran²

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

^{2*}yusranrdy@fis.unp.ac.id

Article Info

Article history:

Received 15th March 2024

Revised 10th April 2024

Accepted 11th July 2024

Keywords:

Stakeholder,
Konvergensi
kebijakan,
Stunting,
Padang

ABSTRACT

This study investigates the role of Local Apparatus Organizations (OPDs) in the convergence of policies aimed at accelerating stunting reduction in Padang City. Employing a descriptive qualitative approach, the research reveals that policy convergence is manifested through OPD engagement in the stages of planning, implementation, and coordination, with the goal of fostering synergy in the fight against stunting. However, despite the expressed cross-sectoral commitment, the presence of sectoral egos and differing interpretations among agencies pose significant challenges to effective implementation. Additionally, constraints such as limited human resources, budgetary shortfalls, inadequate coordination, and lack of discipline among OPDs contribute to the suboptimal performance of the program. The findings underscore the need for follow-up actions and a more profound comprehension of policy convergence to enhance the success of these initiatives.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.
©2024 by the author(s).



Corresponding Author:

Rahmadani Yusran

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Universitas Negeri Padang

yusranrdy@fis.unp.ac.id

PENDAHULUAN

Implementasi penanganan stunting memiliki kendala akibat minimnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perbedaan fokus dan prioritas masing-masing OPD menjadi hambatan dalam menyatukan visi dan misi. Meskipun rapat berkala dan diskusi lintas dinas telah dilakukan untuk menyelaraskan program, ego sektoral antar instansi menjadi hambatan utama. Kebijakan dan program yang terfragmentasi antar sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial, menghasilkan kurangnya integrasi dan kerjasama lintas sektoral. Beberapa masalah yang tampak misalnya adalah: ketidakhadiran semua dinas dalam pelaksanaan rembuk stunting semakin memperparah celah dalam komitmen dan koordinasi.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam tata kelola pemerintahan adalah melalui konvergensi kebijakan. Konvergensi dalam pencegahan stunting adalah pendekatan intervensi yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan secara kolektif menuju tujuan daerah prioritas berbasis geografis dan rumah tangga. Dasar pelaksanaan konvergensi kebijakan ini merujuk pada Peraturan Wali Kota (Perwako) Padang No. 80 Tahun 2022 mengenai percepatan penurunan stunting di Kota Padang. Pelaksanaan konvergensi kebijakan ini mencakup berbagai tahap, yaitu penyamaan persepsi antar OPD, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian. Meskipun langkah-langkah ini telah ditetapkan, konvergensi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Padang masih belum memberikan dampak yang signifikan. Salah satu kendala utama dalam menyatukan visi dan misi terkait program penurunan stunting adalah adanya ego sektoral dan perbedaan interpretasi antar dinas. Banyak dinas lebih mengutamakan kepentingan dan prioritas program mereka sendiri sehingga menolak program yang dianggap tidak sesuai.

Hal ini mengakibatkan ketidaksepahaman dalam metode implementasi kebijakan dan mempersulit upaya kolaborasi untuk mencapai tujuan penurunan stunting yang efektif. Implementasi konvergensi kebijakan penurunan stunting juga dihadapkan pada berbagai rintangan besar, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas OPD. Keterbatasan anggaran dan tenaga kerja menjadi hambatan utama. OPD seringkali kekurangan dana untuk mendanai program-program yang diperlukan serta staf yang memadai untuk melaksanakan program secara efektif. Akibatnya, program konvergensi berjalan kurang optimal, menghambat upaya penurunan stunting, dan membuat target-target yang telah ditetapkan sulit dicapai. Kelemahan struktural dalam manajemen sumber daya di OPD perlu segera diatasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Meskipun berbagai program telah diluncurkan di Kota Padang, terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas dan pencapaian tujuan jangka panjangnya. Dari observasi peneliti di lapangan, masyarakat banyak yang tidak memenuhi kriteria penerima manfaat. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam proses penyaringan dan pencapaian target penanganan stunting. Penyebab utamanya, berdasarkan wawancara awal peneliti di lapangan adalah kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai kriteria penerima. Selain itu, organisasi pelaksana sering menghadapi kendala komunikasi yang menyebabkan informasi tidak jelas dan tumpang tindih.

Penelitian tentang pelibatan lintas sektoral dalam penurunan stunting sudah pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya, pelibatan lintas sektor dalam penurunan stunting yang belum terintegrasi sehingga belum berdampak kepada masyarakat (Karida, 2023), koordinasi yang hanya bersifat sektoral di beberapa kota di Sumatera Barat (Suci, 2023), serta program pencegahan stunting yang belum berdampak bagi anak dan balita di Nagari (Sari, R & Montessori, M, 2021).

Kemajuan yang lambat dalam mengurangi stunting selama dua dekade terakhir memerlukan peningkatan koordinasi lintas sektor. Di sisi lain, komitmen dan keterlibatan pemerintah dari sektor kesehatan dan non-kesehatan menjadi sangat penting (Suharto, T., 2022). Walaupun demikian, program pengurangan stunting yang efektif memerlukan sinkronisasi dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan untuk menghindari konflik dan mencapai tujuan bersama (Hermawan, M. F., 2023).

Penelitian lainnya mengenai konvergensi kebijakan juga dilakukan oleh (Iqbal dan Yusran, 2021) yang mengungkapkan bahwa kebijakan konvergensi belum diimplementasikan secara optimal pada tiga tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di samping itu, pesan serta materi edukasi yang belum optimal menjadi permasalahan di beberapa wilayah (Kumaladewi dan Yusran, 2023). Koordinasi antar sektor dalam organisasi pemerintah harus ditingkatkan melalui peraturan daerah serta staf kesehatan/staf pendidikan harus dilatih dengan baik (Febrian dan Yusran, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini akan membahas sejauh mana keterlibatan OPD dalam konvergensi kebijakan sehingga berdampak pada percepatan penurunan stunting di kota Padang. Penulis menggunakan konsep evaluasi kebijakan untuk menangani permasalahan stunting. (Dunn, 2018) melihat bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses penting yang melibatkan atribusi, alokasi sumber daya, dan penilaian keseluruhan. Penilaian tidak hanya berpusat pada produk akhir tetapi juga pada prosedur pembuatan kebijakan itu sendiri yang mencakup analisis kausal dan keefektifan kebijakan dan inisiatif publik.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan (Denzin dan Lincoln, 1987), penelitian kualitatif dilakukan dalam lingkungan alami untuk memahami dan menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode yang tersedia. (Mulyana, 2008) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode ilmiah untuk mengungkap fenomena melalui deskripsi data dan fakta secara menyeluruh mengenai subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang karena belum ada penelitian sebelumnya tentang evaluasi konvergensi percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut. Kota Padang dipilih karena adanya kontras antara peningkatan kemiskinan dan penurunan angka stunting, serta sebagai ibu kota provinsi, penanganan stunting di Kota Padang seharusnya lebih baik dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan dokumentasi. Untuk uji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan mengolah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan menyajikannya dalam beberapa paragraf. Kemudian, data dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Selain itu, metodologi evaluasi kebijakan oleh (Dunn, 2018) digunakan untuk melihat tiga elemen utama dalam evaluasi kebijakan: evaluasi sementara, evaluasi resmi, dan evaluasi keputusan berbasis teori. Metode ini menekankan perlunya memahami beragam faktor dan aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Pemahaman mendalam tentang evaluasi kebijakan menurut (Dunn, 2018) memberikan perspektif berharga dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik yang efisien yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelibatan OPD pada upaya percepatan penurunan stunting di Kota Padang merupakan langkah strategis mengintegrasikan lintas sektor dalam mencapai target penurunan stunting. Melalui konvergensi kebijakan, OPD dapat bersinergi mengimplementasikan program yang terkoordinir. Keterlibatan lintas sektor ini penting untuk memastikan bahwa tingkat capaian kebijakan percepatan

penurunan stunting secara komprehensif. Sesuai dengan Perpres No. 72 Tahun 2021, SK Gubernur Sumatera Barat No. 440-380-2020 dan Perwako No. 80 Tahun 2022, pelibatan lintas sektor dalam hal ini OPD dalam percepatan penurunan stunting terlihat dalam bentuk:

1. Perencanaan

Perencanaan konvergensi adalah pendekatan sistematis yang menyatukan berbagai upaya dan sumber daya dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mengurangi angka stunting di Kota Padang. Perencanaan dalam konvergensi melibatkan proses sistematis untuk mengkoordinasikan berbagai upaya dan sumber daya dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tujuan mencapai hasil yang efektif dan efisien dalam mengatasi suatu masalah atau isu. Proses ini mencakup langkah-langkah kunci seperti identifikasi masalah, penetapan tujuan, pemetaan sumber daya, pengembangan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Dalam konteks perencanaan konvergensi kebijakan, keterlibatan OPD sering dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun tenaga kerja. Keterbatasan anggaran membuat OPD kesulitan membiayai program yang diperlukan, sedangkan kekurangan tenaga kerja menghambat pelaksanaan program secara efektif. Akibatnya, upaya konvergensi kebijakan percepatan penurunan stunting terhambat, dan target yang ditetapkan sulit dicapai. Temuan ini didukung kajian yang dilakukan (Kurniawan, A., 2023) yang melihat bahwa komunikasi dan inovasi merupakan aspek penting dalam penanganan stunting.

Sinkronisasi waktu dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di setiap OPD belum menerapkan standar alokasi anggaran yang signifikan untuk percepatan penurunan stunting. Pernyataan ini relevan dengan pendapat (Dunn, 2018) yang melihat kebijakan akan efektif dilaksanakan apabila tersedia sumberdaya yang memadai. Perbedaan pemahaman tentang konvergensi kebijakan penurunan stunting menyebabkan perencanaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran tidak efektif dan efisien.

2. Pelaksanaan

Keterlibatan OPD pada pelaksanaan konvergensi kebijakan dan strategi untuk mempercepat penurunan stunting di Kota Padang melibatkan berbagai aspek seperti koordinasi antar instansi terkait, pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta sosialisasi dan advokasi kebijakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan anti-stunting. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial, terlibat dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi implementasi kebijakan ini. Langkah ini juga bertujuan guna menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya mencegah stunting dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, dan diskusi khusus tentang stunting. Sasaran utamanya adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Padang serta mencapai target percepatan penurunan stunting dengan melibatkan masyarakat.

Namun demikian, implementasi konvergensi belum berhasil dilaksanakan. Hal ini, disebabkan karena adanya kesulitan dalam koordinasi. Ada kalanya personil yang mengikuti rapat koordinasi bukan pimpinan OPD dan bahkan personil yang ditugaskan sering bertukar, sehingga menyulitkan mengambil keputusan dalam merancang program lintas sektor. Tidak semua OPD memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan program konvergensi. Akibatnya, implementasi konvergensi kebijakan stunting seringkali tidak efektif dilaksanakan.

Tindakan konvergensi pada dasarnya perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan dan pelaksana kebijakan yang konsisten sangat dibutuhkan untuk mendorong upaya pencegahan stunting (Suharto, T., 2022). Selain itu, perilaku organisasi dan kolaborasi antar organisasi dalam mencapai target kebijakan perlu diperhatikan (Andriani.R., 2023).

3. Pengorganisasian

Koordinasi dan kolaborasi antar OPD memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama, dan harus bersinergi dengan dinas-dinas lain agar program berjalan efektif. Penyatuan kebijakan dari berbagai dinas terkait menunjukkan bahwa stunting memerlukan pendekatan komprehensif dan antar sektor. Pengorganisasian dalam konvergensi untuk mempercepat penurunan stunting di Kota Padang merupakan proses pengaturan dan penataan yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan mempercepat penurunan stunting. Pengorganisasian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pencegahan stunting. Berbagai OPD terlibat untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kendala yang dihadapi di Kota Padang adalah: koordinasi yang buruk antar OPD. Hal ini mengakibatkan informasi penting mengenai kebijakan dan pelaksanaan program tidak tersampaikan dengan baik. Selain itu, koordinasi yang buruk telah mengakibatkan interpretasi dan implementasi yang berbeda-beda di setiap OPD. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakefisienan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik antar OPD, menghambat sinergi, dan mengurangi dampak positif dari kebijakan yang telah dirancang.

Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar OPD menyebabkan upaya konvergensi kebijakan tidak berjalan dengan baik. Tanpa komunikasi yang efektif, sulit untuk menyatukan langkah dan memastikan setiap OPD bekerja menuju tujuan yang sama. Koordinasi yang rendah dan perbedaan kapasitas dan kompetensi antar lintas sektor menyebabkan konvergensi kebijakan tidak efektif dilakukan (Dunn, 2018).

KESIMPULAN

Keterlibatan berbagai sektor dalam upaya konvergensi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Padang memiliki peran yang sangat krusial. Hal ini karena koordinasi dan kerja sama lintas sektor dapat meningkatkan efektivitas integrasi kebijakan. Namun, keterlibatan ini belum mencapai tingkat optimal, disebabkan oleh dominasi keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tingkat gagasan dan konsep yang masih parsial dan belum menghasilkan dampak signifikan pada implementasi program. Kendala seperti ego sektoral dan perbedaan persepsi antar sektor sering muncul dan menghambat upaya percepatan penurunan stunting. Ke depan, pemerintah Kota Padang perlu memperkuat komitmen lintas sektor, dengan fokus pada pengembangan program-program konkret yang mampu memberikan dampak nyata dan signifikan terhadap percepatan penurunan stunting. Sebagai usul, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan model kolaborasi lintas sektor yang efektif dalam konvergensi kebijakan stunting, serta evaluasi implementasi program yang telah berjalan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong keberhasilan.

REFERENSI

- Andriani, R. (2023). Stunting policy convergence model in South Buton Regency. *AcTion: Aceh Nutrition Journal*, 8(3), 455-465.
- Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 11-21.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage.

Rayhan Fadlan, Rahmadani Yusran. *Keterlibatan Lintas Sektor pada Konvergensi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Padang*

- Dunn, B. W. (2018, May). Problem structuring in public policy analysis. In International Public Policy Association Conference, T03 Wicked Problem Workshop, Pittsburgh. Available for download at the following URL: <https://www.ippapublicpolicy.org/file/paper/5aeff35b03d17.pdf> (accessed 3 March 2020).
- Hermawan, M. F., Yudha, E. P., Kusno, K., & Nugraha, A. (2023). Konvergensi Aktor Kelembagaan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Sumedang. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 9(1), 727-740.
- Iqbal, M., & Yusran, R. (2021). Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 109-116.
- Karida, Y., Yusran, R., Alhadi, Z., & Permana, I. (2023). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Padang Lawas. *Journal of Civic Education*, 6(3), 206-212.
- Kumaladewi, R., & Yusran, R. (2023). Dinamika Advokasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 1119-1124.
- Kurniawan, A. (2023). Konvergensi Komunikasi dan Inovasi Sebagai Modal Sosial Penanganan Stunting: Convergence of Communication and Innovation as Social Capital for Handling Stunting. *ETTISAL: Journal of Communication*, 8(2), 89-108.
- Mulyana, D. (2008). Metodologi penelitian kualitatif: Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sari, R. P. P., & Montessori, M. (2021). Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengatasi Masalah Stunting pada Anak Balita. *Journal of Civic Education*, 4(2), 129-136.
- Suharto, T., Amirah, A., & Ichwansyah, R. (2022). Implementation of Convergence Action to Accelerate Stunting Reduction in Labuhan Batu Regency, North Sumatra. *Journal of Community Health Provision*, 2(3), 155-162.
- Suci, E. W., Yusran, R., Adnan, M. F., & Alhadi, Z. (2023). Policy Implementation of Stunting Prevention in Solok Selatan Regency. *Science and Environmental Journal for Postgraduate*, 5(2), 127-132.